10		9	No.	Harris	No. of the last	8	1	, de la companya de l	
Menyampaikan Dokumen Perjankin beserta Surat Pengantar kepada Biro Organisasi		Jika setuju menandatangani Dokumen Perjankin dan Surat Pengantar, jika tidak mengembalikan ke sekretaris			konsep dokumen Perjankin dan memberi paraf Surat Pengantar	Membuat/Menandatangani Nota Dinas penjelasan mengensi	3	URAIAN PROSEDUR	
Q						3		Staf	
						4		Kasubbag Renja, Keuangan dan Aset	
						5		Sekretariat & Bidang pada BPSDM Prov. Kalbar	PELAKSANA
		idak	→[	<b>}</b>	-(a)	6		Sekretaris	
	Ya	<b>&gt;</b>				7		Kepala Badan	
Dokumen Perjankin dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani		Dokumen Perjankin dan Surat Pengantar yang telah diparaf			Perjankin dan Konsep Surat Pengantar	Biografia Konsen Dokumen 30 menit		Kelengkapan	М
1 jam		15 menit	5			30 menit	•	Waktu	MUTU BAKU
Penggandaan, Pendistribusian dan Pengarsipan	ditandatangani	Dokumen Perjankin dan Surat Pengantar yang telah		diparaí	Penjelasan, Dokumen Perjankin dan Surat	Nota Dinas	10	Output	
						:	11	KET	

	DENIAL ESCRETATION	Sami	Proje.	PELAKSANA	Sultrative in	Керина	M	UTU BAKU	Contract State	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Staf	Kasubbag Renja, Keuangan dan Aset	Sekretariat & Bidang pada BPSDM Prov. Kalbar	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1	2	3	4	5	6	7	Pengerina - 8	9	prendiction 10 duration	11
1	Menelaah Surat Sekretaris Daerah Mengenai Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (Perjankin) dan memerintahkan Penyiapan Perjankin SKPD kepada Sekretaris Badan						Surat Sekretaris Daerah	15 menit	Disposisi	
	a mounte angeled Dalotages Personale dua Burez				Mair		Delraseon Perjar kan 180	lis monis	Decomes Perjankan	
2	Memerintahkan penyusunan dokumen Perjankin					-	Disposisi Kaban	15 menit	Disposisi	
3	Menelaah Dokumen Renstra Perangkat Daerah (PD), Renja PD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), kemudian menyusun format pengumpulan data dan informasi pendukung penyusunan dokumen Perjankin beserta Nota Dinas yang ditujukan kepada seluruh bidang dan sekretariat	<b>5</b>					Disposisi Sekban, Renstra PD, Renja PD dan DPA SKPD	3 jam	Nota Dinas dan Format Pengumpulan Data dan Informasi	
4	Penyampaian data dan informasi pendukung penyusunan dokumen Perjankin dari Seluruh Bidang dan Sekretariat		P				Nota Dinas dan Format Pengumpulan Data dan Informasi	3 hari	Data dan Informasi Pendukung dari Seluruh Bidang dan Sekretariat	
5	Melaksanakan rapat pembahasan dokumen perjankin dengan seluruh Tim Penyusun Perjankin (Kepala Badan, Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang, Kasubbag dan Kasubbid serta Staf)		4				Undangan Rapat	3 jam	Notulen Hasil Rapat dan Konsep Perjankin	
6	Menyusun Konsep Dokumen Perjankin berdasarkan hasil rapat pembahasan dan konsep Surat Pengantar kepada Biro Organisasi		Ť				Notulen Hasil Rapat dan Konsep Perjankin	1 jam	Disposisi, Konsep Dokumen Perjankin dan Konsep Surat Pengantar	

S. Ottom Commission of the Com	(Plantage debate of Peyer Co.)	EMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT AN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	THE PLANT OF THE P	Const.		Q Marie	
and the same of th	Nama SOP		Disahkan Oleh	Tgl Pengesahan	Tgl Revisi	Tgl Pembuatan	Nomor SOP
	Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja	Pembina Utama Muda NIP 19660210 198603 1 011	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	15 Nopember 2019	4 Oktober 2019	12 Agustus 2019	SOP.800/ 14 /BPSDM/2019

	Tgl Pengesahan	15 Nopember 2019
THE PLANT OF THE P	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		Drs. ALFIAN, MM  Pembina Utama Muda  NIP 19660210 198603 1 011
the company and defend to the company of the compan	Nama SOP	Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
BAGIAN SEKRETARIAT	The state of the s	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	ana Luguesa Cabas, Barasa Islam 1996 Dana das
<ol> <li>Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Daerah;</li> <li>Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li> </ol>		Pendidikan minimal S1 Memahami struktur organisasi Badan Pengembangan SDM Prov. Kalbar Memahami tata cara perumusan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis dan Target Kinerja
	4. Memahami pro	Memahami proses penyusunan program dan kegiatan pada perangkat daerah
<ul> <li>b. Fermenpan dan kb kl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Fetunjuk Jeknis Ferjanjian kinerja, Felaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ul>		and the form of the Control of the C
Provinsi Kalimantan Barat;  8. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPSDM Prov Kalbar.		Senerge Co.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	ipan I radoman Parat III da da da Dan II da da Sana II da
The second secon	<ol> <li>Renstra Perangkat Daera</li> <li>Renja Perangkat Daerah</li> <li>Komputer/laptop</li> <li>Printer</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>	Renstra Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Renja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komputer/laptop Printer Alat tulis kantor
Peringatan:  Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan salah satu pedoman dan acuan didalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Apabila tidak sesuai SOP, maka penyusunan dokumen ini tidak akan berjalan lancar.	Pencatatan dan Pendataan : Indikator Kinerja Utama, sa tahun	Pencatatan dan Pendataan : Indikator Kinerja Utama, sasaran strategis dan target kinerja untuk periode 1 (satu) tahun

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT